

IMPLEMENTASI PROGRAM GREEN LIVELIHOOD ACCESS FOR CENTRAL KALIMANTAN'S INCLUSIVE ENVIRONMENTAL RESPONSE TO CLIMATE CHANGE (GLACIER) 2012-2013

Rahmi Agustina¹
Nim. 1202045143

Abstract

GLACIER is an environmental conservation program of the ILO, focusing on community empowerment through access to green livelihoods for inclusive environmental responses. GLACIER is needed to empower the communities in the Central Kalimantan EMRP area and to optimize Inpres no. 2 of 2007 and Inpres no. 10 of 2011. The purpose of this research is to explain the implementation of GLACIER program in Central Kalimantan. The type of this research is descriptive, the research is researched using the concept of community empowerment. The results show that GLACIER is comprised of six programs: Fire Prevention and Management, Spatial and Infrastructure Management, Management and Conservation of Sustainable Peatlands, Agricultural Revitalization, Empowerment and Community Social Economic Development, and Institutional Development and Capacity Building Institutions. In the program implementation, there are four programs that succeed in reducing poverty in the EMRP area, enhancing stakeholders 'and local communities' understanding of pro-environment livelihoods, protecting the rights of indigenous peoples and improving infrastructure in facilitating access to markets. However, there are also two unsuccessful activities as they can not reduce the fire rate in EMRP areas that grow significantly by 2015, as well as increase revenues from local, medium and long-term resources.

Keywords: GLACIER, ILO, Central Kalimantan

Pendahuluan

Kalimantan Tengah memiliki luas lahan gambut mencapai 3.010.640 hektar dan mengalami kerusakan seluas 1.462.296 hektar. Hal ini berawal dari pengembangan lahan gambut (PLG) satu juta hektar yang dilaksanakan berdasarkan Inpres 5 Juni 1995 tentang ketahanan pangan, diikuti oleh keputusan Presiden No. 82 Tahun 1995 tentang pengembangan lahan gambut untuk pertanian. Akan tetapi, proyek PLG mengalami kegagalan dan resmi ditinggalkan pada tahun 1999 (Dian Verdiana QH, *Pengelolaan Terpadu Kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Hektar*).

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: abcamiabc@gmail.com

Kegagalan proyek PLG yang merupakan awal dari rusaknya lahan gambut, ternyata diperburuk dengan pengalihan fungsi lahan di mana sejak tahun 2004 banyak konsesi perkebunan kelapa sawit masuk di kawasan Eks PLG, *illegal logging*, serta kebiasaan masyarakat lokal melakukan pembabatan dan pembakaran hutan dalam membuka lahan secara berlebihan (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_241342.pdf).

Penggunaan lahan gambut yang tidak benar mengakibatkan terjadinya kerusakan struktur gambut, sehingga menjadi kering, ditumbuhi semak-semak, dan rentan kebakaran. Kebakaran tersebut memberikan dampak negatif di lingkungan sosial masyarakat lokal yang berada di kawasan Eks PLG yaitu, hilangnya sumber pendapatan dari hasil hutan dan berkurangnya lahan perikanan. Kondisi ini menyebabkan keadaan masyarakat lokal menjadi bertambah miskin dan jika dibiarkan akan mengakibatkan meningkatnya kerawanan di bidang keamanan.

Adanya dampak yang dialami oleh masyarakat kawasan Eks PLG, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 2007 mengenai rehabilitasi dan konservasi kawasan Eks PLG dan inpres No. 10 Tahun 2011 tentang pemberhentian kegiatan pembukaan hutan adat (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_205664.pdf). Namun, implementasi program tidak berjalan optimal karena menurut masyarakat lokal program tersebut hanya untuk melindungi gambut tanpa melibatkan masyarakat lokal secara aktif, bahkan seolah menyingkirkan masyarakat di mana dalam lahan tersebut terdapat ruang tata kelola masyarakat, sehingga seringkali menimbulkan konflik baru.

Masalah ini menyebabkan *International Labour Organization* (ILO) menjalankan program percontohan di kawasan Eks PLG yang disebut *Green Livelihood Access for Cental Kalimantan's Inclusive Evironmental Response to Climate Change* (GLACIER). Program ini dijalankan di lima desa kawasan Eks PLG yaitu, Aruk, Lawang Kajang, Bereng Bengkel, Pilang, dan Nusa Tumbang pada tahun 2012 hingga 2013 untuk mengoptimalkan Inpres No. 2 Tahun 2007 dan Inpres No. 10 Tahun 2011, dengan penyempurnaan tata kelola di lahan gambut dengan melibatkan masyarakat lokal serta mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas sebanyak 26%. Selain itu bertujuan meningkatkan akses ke mata pencaharian berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga sesuai dengan prinsip yang digariskan dalam Masyarakat Konvensi Hukum Adat, 1989 (No. 169) (<http://iloblog.org/2013/08/07/dayak-ngayu-kalimantan/>).

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Strategic Patnership

Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)

Menurut Ife pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri (Dr. Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*). Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan Rappaport tentang pemberdayaan yang merupakan cara di mana

masyarakat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Sedangkan menurut Suharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah sehingga mereka memiliki kemampuan untuk (Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*):

- a. Memenuhi kebutuhan dasar sehingga memiliki kebebasan, dalam arti bebas dalam mengemukakan pendapat, bebas dari masalah kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
- b. Mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka bisa meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang serta jasa yang mereka butuhkan.
- c. Mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sesuai dengan beberapa definisi mengenai pemberdayaan maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan adalah usaha yang diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menjadi lebih mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi yang awalnya dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menekankan pada keikutsertaan masyarakat secara berkesinambungan dan memiliki fokus terhadap pembangunan manusia atau bisa disebut memanuisakan manusia. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga dipahami sebagai suatu upaya yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat atau individu yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (<http://www.kemsos.go.id/modules>).

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses karena merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam artian masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah dalam kemiskinan. Sebagai tujuan karena mengarah pada hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dalam bentuk fisik, ekonomi, dan sosial seperti memiliki rasa kepercayaan diri, bisa menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan dilakukan penerapan pendekatan yang menurut Suharto dapat dilakukan melalui, pemungkinan, penguatan, perlindungan penyokongan dan pemeliharaan. Ada pun penjelasannya sebagai berikut (Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*):

1. **Pemungkinan**, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat kultural dan struktur yang menghambat.
2. **Penguatan**, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan**, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan**, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. **Pemeliharaan**, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta mengenai implementasi GLACIER di Kalimantan Tengah, khususnya di lima desa kawasan Eks PLG (2012-2013) dalam upaya meningkatkan akses mata pencaharian lokal yang ramah lingkungan bagi masyarakat di kawasan Eks PLG. Data-data yang disajikan adalah data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka dan literatur-literatur seperti buku, internet, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah telaah pustaka. Teknik yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif dengan metode konten analisis.

Hasil Penelitian

Perkembangan Industri China

Lahan gambut di Indonesia memiliki ketebalan 1–12 meter, bahkan di tempat-tempat tertentu bisa mencapai ketebalan 20 meter. Dari luasan tersebut 7,2 hektar (35%) terdapat di pulau Sumatera, 5,7 hektar (27,8%) di pulau Kalimantan dan 7,97 juta hektar (38,7%) di Papua.

Di Pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki cakupan gambut terluas, yaitu mencapai 3,472 juta hektar atau sekitar 21,98% dari total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 15,798 juta hektar. Namun, dari luasnya lahan gambut di Kalimantan Tengah, ternyata juga mengalami kerusakan yang sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga kegiatan, yaitu proyek pengembangan lahan gambut (PLG), kegiatan *illegal logging* dan alih fungsi menjadi perkebunan sawit.

Proyek PLG dimulai pada masa pemerintahan Soeharto dan dikerjakan secara bertahap mulai tahun 1996, di mana dari keseluruhan luas wilayah PLG luasan yang baru dibuka yaitu mencapai 3,3% dan pencetakan sawah hanya 2,9%. Pencapaian tersebut telah menghabiskan waktu dua tahun anggaran 1996/1997 dan 1997/1998, sedangkan luas wilayah yang belum dibuka seluas 1.409.150 ha (http://faperta.ugm.ac.id/download/publikasi_dosen/tejoyuwono/1991/1998%20proy.pdf).

Pada tahun 1997, studi AMDAL telah dilakukan oleh ITB dan menyatakan, bahwa perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai *Land Suitability* dan *Land Capability*. Namun, pernyataan tersebut malah diabaikan oleh pemerintah, sehingga selain memberikan kesangsian terhadap pakar ilmu tanah, pakar agronomi, serta pakar di bidang ekonomi, sosial dan budaya, ternyata juga menjadi awal kerusakan lahan gambut akibat pembukaan lahan, pembangunan kanal, penebangan hutan dan pencetakan sawah mengakibatkan terjadinya perubahan pola tata air serta kualitasnya, di mana telah terjadi penurunan pH air menjadi $\text{pH} < 3,5$. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya tanaman yang mati akibat lapisan gambut yang mengandung unsur besi dan belerang telah menjadi racun pada tumbuhan. Akhirnya proyek PLG pun mengalami kegagalan dan resmi ditinggalkan pada tahun 1999.

Ada pun kawasan yang digunakan untuk proyek tersebut secara geografis terletak di antara Kota Palangkaraya (Sungai Kahayan) ke arah timur melalui Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 kilometer memotong Sungai Barito di Mangkatip. Pada bagian barat, lokasi PLG membujur dari Kota Palangkaraya ke arah selatan menyusuri sebelah timur Sungai Sebangun ke arah selatan hingga bermuara di Teluk Sebangun di laut Jawa. Sedangkan lokasi Eks PLG di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Barito dan menyusuri Sungai Barito, Sungai Kapuas Murung ke arah selatan melewati Kuala Kapuas hingga muara Sungai Kapuas yang bermuara di Laut Jawa. Setelah resmi ditinggalkan, akhirnya lahan bekas proyek PLG menjadi terbengkalai dan menjadi sasaran empuk bagi pelaku *illegal logging*. tercatat dari tahun 2000-2009 laju *illegal logging* di lahan gambut mencapai 28 ribu ha/tahun. Ada pun wilayah yang digunakan untuk aktivitas *illegal logging* berada di hutan-hutan yang berdekatan dengan kanal di Saluran Induk Primer bekas Eks PLG, wilayah tersebut dipilih karena akan memudahkan para pelaku untuk membawa kayu-kayu tersebut keluar dari hutan. Sebagian besar aktivitas *illegal logging* dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kayu beberapa di antaranya adalah PT Kahayan Hutan Lestari, Tanjung Lingga grup, dan PT Prasetya Mitra Muda, serta masyarakat yang tidak bertanggung jawab (<http://www.gcftaskforce.org/documents/Kalteng%20-%20GCF%20Draft%20Booklet.pdf>).

Selain itu adanya pengalihan fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit juga merupakan salah satu persoalan dari rusaknya lahan gambut di Kalimantan Tengah. Sejak awal tahun 2008 Pemerintah Pusat dan Daerah telah mengeluarkan izin kepada 23 unit perusahaan sawit di kawasan gambut pada lahan Eks PLG dengan luas total +369.400 hektar. Selain itu terdapat 92% perusahaan perkebunan dan tambang telah melakukan pelanggaran pembukaan lahan tanpa memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), hal ini terjadi sejak 2009-2011 (<https://eia-international.org/wp-content/uploads/Testing-the-Law-Indonesian-version1.pdf>).

Ada pun beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran atas pembukaan lahan yaitu, PT Suryamas Cipta Perkasa, PT Nusantara Sawit Persada, dan PT Flora Nusa Perdana. Beberapa kawasan yang dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit yaitu, Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan dan Palangkaraya. Selain itu setiap tahunnya pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan mencapai 64 ribu hektar.

Dari ketiga kegiatan di atas ternyata telah memberikan dampak negatif di Kalimantan Tengah, sehingga berpengaruh pada kondisi masyarakat di desa kawasan eks PLG. Hal ini terbukti dari, terjadi peningkatan angka pengangguran akibat terputusnya jalur mata pencaharian, yaitu pada tahun 2010 mencapai 8,5 ribu, serta menurunnya angka produksi masyarakat yang bermata pencaharian petani yaitu hanya mencapai 6,44% pada tahun 2004 dan nelayan di tahun 2006 hanya 259,48 ton. Penurunan angka produksi ini terjadi akibat memburuknya kualitas air dan tanah, sebagai dampak dari kerusakan lahan gambut.

Merujuk pada keadaan di kawasan Eks PLG, maka ILO menjalankan program percontohan GLACIER yang dilakukan sebagai salah satu upaya mempromosikan *green jobs*, sekaligus sebagai pengembangan dari kerja sama yang sedang berlangsung dengan Pemerintah Indonesia, yaitu *Green Jobs in Asia* sejak Agustus 2010 – Juli 2012. Selain itu GLACIER juga dikembangkan guna mendukung program pemerintah Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, pelestarian, dan rehabilitasi ekosistem.

GLACIER memiliki strategi untuk menyempurnakan Rencana Induk rehabilitasi dan revitalisasi Eks PLG Kalimantan Tengah tahun 2008 sesuai dengan instruksi Presiden No. 2 Tahun 2007, dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di kawasan Eks PLG Kalimantan Tengah. Program percontohan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk promosi kegiatan restorasi lingkungan, pembangunan ekonomi hijau yang sesuai dengan masyarakat lokal dan rantai nilai penghijauan.

Sebelum menerapkan proyek GLACIER, pada bulan Juli 2012 dilakukan kegiatan investigasi awal oleh ILO teknis, Petugas Program, dan konsultan internasional untuk menilai keadaan lingkungan di kawasan Eks PLG. Ada pun alasan mengapa kawasan Eks PLG, Kalimantan Tengah dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan proyek percontohan GLACIER karena sejalan dengan inpres No. 2 Tahun 2007 dan inpres No. 10 Tahun 2011-2013, mengenai diperlukannya rehabilitasi dan konservasi kawasan Eks PLG guna mengurangi emisi gas rumah kaca akibat penggundulan dan degradasi hutan. Selain itu karena kawasan Eks PLG merupakan tempat terjadinya mega deforestasi dan sekaligus degradasi di kawasan lahan basah (http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/114B09_57_indo.pdf).

Dalam penerapan GLACIER, ILO bekerja sama dengan UNDP melalui *Letter of Agreement* (LOA) yang ditandatangani bulan Agustus 2012, dengan anggaran dari pemerintah Norwegia sebesar US\$ 1,398,517. Pendanaan ini diberikan oleh Pemerintah Norwegia sebagai bentuk kepercayaan dan fasilitasi terhadap mitra-mitra yang mendukung pengurangan degradasi serta deforestasi di kawasan Eks PLG (http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/114B09_57_indo.pdf). Selain itu, ILO juga membentuk kemitraan dengan lembaga *United Nations Office for Coordination*

on REDD+ serta beberapa mitra utama, yaitu:

- a. Sekretariat Bersama REDD+ di Kalimantan Tengah
- b. Komisi REDD+ di tingkat provinsi
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat provinsi dan kabupaten
- d. Dinas Pekerja Umum tingkat provinsi dan kabupaten
- e. Organisasi Masyarakat Adat (Lembaga Dayak Panarung)
- f. Organisasi Pengusaha
- g. Organisasi Pekerja

Berpedoman pada konvensi ILO No, 169 tentang masyarakat adat serta kerangka kerja *Free and Informed Prior Consent* (FIPC), maka program GLACIER dilaksanakan dengan pendekatan yang memfokuskan pada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. ILO juga melakukan kerja sama yang erat dengan organisasi lokal (Lembaga Dayak Panarung), organisasi pekerja, serta organisasi pengusaha guna memaksimalkan terciptanya lapangan pekerjaan sesuai dengan tujuan bersama.

GLACIER juga membentuk sistem manajemen dalam menjalankan kegiatannya, yaitu di mana Kantor perwakilan ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan proyek percontohan, lalu dioperasikan oleh *Senior National Environmental Specialist* (NOC) dan didukung oleh dua petugas proyek nasional yang seluruhnya berada di Palangkaraya. Selain itu, proyek percontohan tersebut juga akan didukung oleh petugas keuangan di Palangkaraya dan di Jakarta, serta proyek GLACIER akan ditutup oleh petugas program nasional di Jakarta.

Ada pun pelaksanaannya, GLACIER menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan partisipatif yang berbasis pada sumber daya lokal dan pendekatan rantai nilai penghijauan. Pendekatan partisipatif yang berbasis sumber daya lokal dilakukan agar bisa memperkuat kepemilikan lokal dan dapat melibatkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja. Sedangkan untuk menilai peningkatan pembangunan ekonomi lokal dan kapasitas rantai nilai penghijauan, program GLACIER melakukan pendekatan rantai nilai penghijauan dengan mengembangkan:

1. Keterampilan masyarakat lokal dengan melakukan pelatihan keterampilan (EAST) ILO mengenai pelatihan kewirausahaan dan pelatihan kerja.
2. Mengembangkan akses masyarakat lokal menuju pasar sehingga dapat meningkatkan pembangunan di wilayah Eks PLG.

Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan juga menjadi salah satu upaya dalam program GLACIER, sehingga para perempuan dapat lebih meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan program GLACIER. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip kesetaraan peluang kerja dan dalam mempromosikan partisipasi perempuan dalam pekerjaan.

Dalam jangka waktu dua belas bulan, melalui proyek percontohan GLACIER, ILO berupaya untuk memperbaiki akses ke mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal di kawasan Eks PLG. Hal ini disebabkan karena proyek tersebut merupakan proyek jangka pendek, di mana kegiatannya memiliki tujuan untuk

memberikan mata pencaharian kepada masyarakat di kawasan Eks PLG, dan memastikan apakah ketenagakerjaan tersebut mampu memberikan dampak baik dalam waktu pendek, menengah atau panjang pada lingkungan dan perubahan iklim.

Ada enam kegiatan yang diterapkan dalam program GLACIER di lima desa Eks PLG, Aruk, Lawang Kajang, Nusa Tumbang, Pilang dan Bereng Bengkel, yaitu; Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran, Pengelolaan Tata Ruang dan Infrastruktur, Pengelolaan dan Pelestarian Lahan Gambut Secara Berkelanjutan, Revitalisasi Pertanian, Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga.

1. Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran

Berdasarkan asas pemeliharaan dalam konsep pemberdayaan masyarakat, Program Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi perkebunan serta investasi jangka panjang dalam mencegah kebakaran dan deforestasi di Desa Pilang, Bereng Bengkel, dan Nusa Tumbang di mana desa tersebut memiliki risiko kebakaran tertinggi. Sebelum melakukan rangkaian kegiatan, terlebih dahulu diadakan pertemuan bersama para pemangku kepentingan masyarakat desa untuk menindaklanjuti kegiatan yang dapat dilakukan di setiap desa, termasuk melakukan perancangan kegiatan pencegahan kebakaran. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penggabungan proposal usulan dari masyarakat dan hasil penelitian dari para ahli lingkungan nasional, serta mengenalkan beberapa cara untuk melakukan pencegahan kebakaran dan pengelolaan kebakaran. Hal tersebut dibuktikan dengan didirikannya Pengorganisasian Masyarakat Panitia pada bulan April 2013 yang ditugaskan membantu pengelolaan kegiatan pencegahan kebakaran di ketiga desa tujuan.
- b. Pembentukan Pengorganisasian Masyarakat Panitia pada bulan April 2013, guna meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Pilang, Bereng Bengkel, dan Nusa Tumbang. Pembentukan organisasi tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti perancangan kegiatan pencegahan kebakaran, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan Eks PLG.
- c. Diskusi mengenai pencegahan serta pengelolaan kebakaran berbasis masyarakat yang difasilitasi oleh konsultan internasional di tiga desa yaitu, Desa Pilang, Bereng Bengkel, dan Nusa Tumbang pada bulan Juni 2013.

Kegiatan-kegiatan di atas dilakukan untuk melindungi perkebunan serta investasi jangka panjang dalam mencegah kebakaran dan deforestasi di ketiga desa sasaran. Beberapa kegiatan telah memiliki hasil, yaitu dengan fasilitasi pembangunan kanal-kanal di lahan gambut yang telah dipilih tanpa mengakibatkan terjadinya pengeringan gambut, penyediaan 27 sumur, 1 unit peralatan pemadam kebakaran, 6 mesin pompa air, selang pemadam kebakaran sepanjang 800 meter, dan 3 menara untuk mengawasi terjadinya kebakaran di kawasan Eks PLG yang dilaksanakan pada bulan Juli 2013. ILO *Country Office for Indonesia And Timor-Leste* melaporkan bahwa, 8 sumur dan 1 unit alat pemadam kebakaran telah diberikan di Desa Pilang, 11 sumur di Desa Nusa Tumbang, dan 8 sumur di Desa Lawang Kajang (<http://bpredd.reddplusid.org/pustaka/dokumen/dokumen-satgas->

[redd/provinsi-percontohan/un-agencies](#), diakses 07 Mei 2017).

Hasil dari implementasi kegiatan pencegahan dan pengelolaan kebakaran di Desa Pilang, Bereng Bengkel, dan Nusa Tumbang tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari luas wilayah kebakaran di Kalimantan Tengah khususnya wilayah Eks PLG yang mengalami perluasan secara signifikan pada tahun 2015, yaitu mencapai 122.882,90 hektar. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih memilih untuk bekerja, daripada berpartisipasi secara langsung.

Sebagaimana kegiatan yang menggunakan pendekatan masyarakat, seharusnya GLACIER mampu meningkatkan keterlibatan warga dalam hal memengaruhi pola pikir mereka agar bersedia mendukung, serta berpartisipasi secara penuh di setiap kegiatan.

2. *Pengelolaan Tata Ruang dan Infrastruktur*

Untuk komponen ini GLACIER lebih memfokuskan pada memberikan hasil dalam bentuk pembangunan infrastruktur, serta bimbingan kepada masyarakat di kawasan desa Eks PLG: Aruk, Lawang Kajang, Pilang, dan Nusa Tumbang agar mampu memaksimalkan kegunaan infrastruktur. Berikut kegiatan yang dikelola oleh Panitia Pengorganisasian Masyarakat setempat di desa kawasan Eks PLG, di mana kegiatan dimulai pada bulan Juli 2013 hingga September 2013:

- a. Pembangunan 25 kolam ikan dan pengenalan kepada masyarakat lokal di Desa Lawang Kajang dan Aruk mengenai teknologi untuk memproduksi pangan ikan.
- b. Melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar bagi masyarakat di kawasan Eks PLG. Ada pun pembangunan yang dilakukan adalah:
 - 1) Membangun jembatan gantung sepanjang 200 meter di Nusa Tumbang.
 - 2) Memperbaiki jalan sepanjang 215 meter dan pembangunan tanggul di Aruk.
 - 3) Memperbaiki jalan untuk sepeda motor sepanjang 400 meter dan membangun jembatan kecil sepanjang 6 meter di Pilang. Pembangunan infrastruktur selesai pada bulan Juli 2013.
 - 4) Melakukan pemerataan jalan menuju fasilitas umum (sekolah dan pos kesehatan) serta pembangunan tanggul sepanjang 72 meter di Lawang Kajang. Selesai pada bulan Juli 2013.

Melalui kegiatan ini partisipasi masyarakat sangat ditekankan, hal tersebut dibuktikan dengan pemberian upah yang ditawarkan dari pekerjaan konstruksi. Selain itu, setiap pekerjaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur komponen disusun dan dikelola oleh Panitia Pengurus Masyarakat di setiap desa yang dipilih oleh masyarakat, serta selama pembangunan infrastruktur petugas GLACIER akan memberikan bantuan teknis untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh ahli proyek (NOC). Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat di kawasan Eks PLG mampu menjangkau akses pasar ketika menjual produk mereka, terutama bagi para nelayan dan petani, serta pembangunan ini telah terselesaikan pada bulan September 2013.

3. *Pengelolaan dan Pelestarian Lahan Gambut Secara Berkelanjutan*

Pada bulan Oktober-Desember 2012 para ahli proyek (NOC) terlebih dahulu melakukan serangkaian sosialisasi di lima desa sasaran, serta kabupaten untuk memperkenalkan cara investasi infrastruktur lingkungan, dalam mendukung respon perubahan iklim dengan menggunakan sumber daya lokal dan teknik meningkatkan akses terhadap penghidupan yang berkelanjutan. Ada pun dalam menjalankan sosialisasi tersebut, ILO bekerja sama dengan Universitas Palangkaraya dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).

Pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan di tingkat kabupaten, GLACIER turut melibatkan 43 pemangku kepentingan utama dan lembaga pemerintah, pemerintah desa hingga organisasi masyarakat adat, dan LSM Lokal. Selama proses sosialisasi tersebut petugas program GLACIER bersama UNPAR dan BPTP juga melakukan identifikasi investasi dalam mendukung regenerasi lahan gambut di kelima desa sasaran dan melakukan penilaian kelayakan lahan gambut untuk melakukan penanaman kembali.

Selain itu, kegiatan juga diawali dengan melakukan pertemuan bersama masyarakat untuk menindaklanjuti kegiatan yang dapat dilakukan di setiap desa, termasuk melakukan perancangan kegiatan rehabilitasi lahan gambut. Pertemuan tersebut telah menuai hasil yang baik di mana pada bulan April 2013, GLACIER menggabungkan proposal usulan dari para pemangku kepentingan masyarakat desa dan hasil dari para ahli proyek (NOC) mengenai revitalisasi lahan gambut dan rehabilitasi, serta mengenalkan beberapa cara untuk melakukan pencegahan kebakaran.

Dalam melakukan rehabilitasi lahan gambut yang telah rusak, pada bulan Juni 2013 GLACIER melakukan penanaman 120.000 bibit karet, tanaman buah-buahan dan pohon hutan seluas 176 hektar, sebagai bentuk fasilitasi perkebunan masyarakat dan penerapan hutan agro di desa sasaran yakni, Bereng Bengkel, Nusa Tumbang, Aruk, Pilang, dan Lawang Kajang.

Sebagian besar kegiatan ini lebih terfokus pada rehabilitasi dan pengembangan hutan agro yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan keanekaragaman sumber daya. Sejauh ini keanekaragaman sumber daya, adalah pilihan yang cocok untuk masyarakat desa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan demi mempromosikan pekerjaan yang ramah lingkungan.

Melalui kegiatan ini para Koordinator Program Lokal di desa-desa telah membaaur dengan masyarakat untuk memberikan penjelasan, pengajaran, serta dukungan untuk konsep *green jobs* berbasis sumber daya lokal dari metode perkebunan tumpang sari. Selain itu, dalam cakupan basis keadilan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat, kegiatan tersebut juga menggunakan jenis tanaman yang diperoleh dari pemasok lokal dan hanya bibit karet yang diperoleh dari Kalimantan Selatan sebab adanya keterbatasan pada pemasok bibit karet bersertifikat di Kalimantan Tengah.

Akan tetapi, merujuk pada indikator pemeliharaan di mana masyarakat harus memperoleh kesempatan dalam berusaha agar menjadi lebih mandiri, kegiatan ini dikatakan kurang sukses untuk meningkatkan pendapatan sumber daya lokal dengan jangka waktu menengah dan panjang. Hal ini disebabkan akibat kurangnya pemberian bibit karet di kawasan Bereng Bengkel, di mana mereka hanya mendapatkan 350 batang bibit karet per kepala keluarga untuk 20 KK, sedangkan kenyataannya Bereng Bengkel memiliki 700 KK.

4. Revitalisasi Pertanian

Revitalisasi pertanian adalah salah satu dari program GLACIER dalam melakukan perubahan paradigma pola pikir masyarakat di kawasan Eks PLG. Hal ini bertujuan untuk menopang keberlanjutan berbagai kegiatan dari program GLACIER, agar mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat lokal di bidang pertanian yang berdaya saing, serta mengembangkan kegiatan *pro* lingkungan di masa mendatang.

Serangkaian kegiatan telah dilakukan yaitu adanya Lokakarya Nasional mengenai keterkaitan REDD+ terhadap pekerjaan, pekerjaan berwawasan ramah lingkungan pada November 2013 di Jakarta yang dihadiri oleh tim khusus REDD+ dan konstituen terkait. Hal tersebut bertujuan untuk membahas pendekatan yang memberikan mata pencaharian dan pekerjaan ramah lingkungan berkelanjutan guna mendukung revitalisasi pertanian dalam konteks REDD+. Adanya aktivitas lokakarya juga memberikan ruang bagi para konstituent terkait untuk menyusun strategi penciptaan lapangan pekerjaan ramah lingkungan di kawasan Eks PLG. Selanjutnya, lokakarya ini memberikan masukan dan rekomendasi bagi tim khusus REDD+ dalam merencanakan tahap pelaksanaan REDD+ berikutnya. Lokakarya ini diselenggarakan ILO melalui Proyek GLACIER, juga menandai berakhirnya Proyek GLACIER di Kalimantan Tengah.

Sebagaimana merujuk pada indikator pemeliharaan dalam mempertahankan pola pikir agar tetap *pro* terhadap pekerjaan berbasis ekonomi hijau, maka Pemerintah Kalimantan Tengah menerapkan pendidikan tentang pertumbuhan ekonomi hijau di sekolah-sekolah. Selain itu meningkatkan Peraturan Gubernur No.10/2012 mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yang bersamaan juga untuk memastikan manfaat terkait dengan jasa ekosistem serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadi Peraturan Daerah (<http://greengrowth.bappenas.go.id> diakses pada 25 Desember 2017).

5. Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat

Pada bulan April-Juni 2013 GLACIER melakukan serangkaian pelatihan di kelima desa sasaran, yaitu di bidang kewirausahaan dan mata pencaharian. Dalam kegiatan ini GLACIER telah bekerja sama dengan Universitas Palangkaraya (UNPAR), Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) dan lembaga-lembaga terkait demi kemajuan dari kegiatan tersebut, serta difasilitasi oleh konsultan nasional dan internasional. Selama proses pelatihan partisipasi masyarakat di kawasan Eks PLG sangat ditekankan dimulai dari melibatkan masyarakat dalam pemilihan sektor sumber daya berkelanjutan, hingga memutuskan bahwa sektor karet dan perikanan yang akan menjadi fokus dari kegiatan tersebut.

Mengenai pelatihan perikanan yang difasilitasi oleh UNLAM, pelatihan teori mengenai perikanan dilakukan di Pusat Pelatihan REDD+ di Palangkaraya sebanyak dua kali, untuk pertemuan pertama dihadiri oleh perwakilan dari desa Aruk, Lawang Kajang, dan Pilang, sedangkan untuk pertemuan kedua dihadiri oleh perwakilan dari desa Bereng Bengkel dan Nusa Tumbang. Pada bulan Juni 2013, GLACIER juga membangun 25 tambak ikan sebagai bentuk demonstrasi di Desa Aruk dan Lawang Kajang ditambah dengan 15 tambak ikan yang dibuat secara mandiri oleh masyarakat di dua desa tersebut, sebagai bentuk dukungan pada proses pelatihan praktek bidang perikanan.

Perihal penggunaan sumber daya yang lebih efisien, para petugas lapangan di desa-desa di bawah koordinator program lokal-Palangkaraya, telah membaaur dengan masyarakat untuk memberikan penjelasan, pengajaran, serta dukungan untuk konsep *green jobs* berbasiskan sumber daya lokal. Dibuktikan dari pemberian dukungan mengenai perbaikan desain kolam ikan oleh UNPAR, serta bantuan teknis dalam pembangunan kolam tambak dengan melakukan budidaya ikan lokal seperti ikan haruan dan papuyu.

Kegiatan ini cukup sukses untuk meningkatkan pendapatan sumber daya lokal dengan jangka waktu menengah dan panjang. Hal tersebut tentu saja telah mencakup ke dalam basis keadilan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat, karena jenis ikan yang dibudidayakan adalah jenis ikan lokal yang tentu saja lebih mampu beradaptasi dengan kondisi di kawasan Eks PLG. Selain itu mengenai produksi pangan ikan juga menggunakan bahan lokal, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola budidaya ikan dan memberikan perbaikan dalam pendapatan keuangan.

Dalam pelatihan di bidang pertanian, kegiatan ini mendapatkan petunjuk teknis oleh UNPAR dan pelatihan teknis diselesaikan oleh UNLAM di mana masyarakat diajarkan mengenai keterampilan untuk mengukur kondisi air (pengukuran pH). Selain itu, para petani juga diperkenalkan dan dilatih tentang perkebunan karet sebagai pendekatan jangka panjang. Selama bulan April-Juni 2013, masyarakat lokal diajarkan mengenai cara mengambil getah karet atau lateks dengan baik dan benar yang meminimalkan kerusakan pohon, cara memberantas hama yang menghancurkan pohon, serta pelatihan tentang meningkatkan kualitas hasil getah karet sehingga akan memiliki harga tinggi.

Menurut laporan dari ILO Indonesia dan Timor-Leste, hasil dari pelatihan di bidang pertanian bisa dilihat dari adanya 16.940 bibit karet yang telah ditanam di empat desa, yaitu Nusa Tumbang, Pilang, Lawang Kajang, dan Aruk. Kegiatan ini pun turut melibatkan peran LSM lokal yaitu Lembaga Dayak Panarung (LDP) untuk memperkuat pembentukan kelompok tani dan kelompok perikanan, serta difasilitasi oleh UNLAM di Banjarmasin, UNPAR, dan para ahli lokal, nasional, serta internasional (secara internal adalah ILO dan eksternal adalah konsultan baik individu maupun institusi). Kehadiran LDP memiliki tugas sebagai penyedia jasa pembangunan bisnis untuk memberikan pelayanan bagi kelompok kecil masyarakat baik perikanan mau pun karet, hal tersebut merupakan salah satu

strategi agar para petani karet dan petani tambak mampu menjual hasil panennya dengan harga yang sesuai.

Mengenai peningkatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat tani, maka kegiatan ini juga mengembangkan rencana bisnis melalui pengembangan usaha petani (*Business Development Service (BDS)*), bertujuan guna mendukung penyedia layanan termasuk hubungan keuangan dan hubungan pedagang yang adil untuk memberikan dukungan rencana bisnis perusahaan petani.

Pada bulan April 2013, GLACIER juga melakukan pelatihan di bidang kewirausahaan yang diberikan kepada masyarakat di kawasan Eks PLG, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dari Kabupaten Kapuas, Pulang Pisang, dan Palangkaraya, Dinas Koperasi, serta Pelatihan Tenaga kerja Provinsi. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan bagi para penerima sasaran dalam membuka usaha dan memperbaiki pendapatan, sehingga akan saling berhubungan dengan pelatihan perkebunan karet dan perikanan sebab dengan adanya pelatihan di bidang kewirausahaan, mereka akan mampu mempersiapkan investasi jangka panjang berupa hasil dari pekerjaan rantai hijau.

Kegiatan ini lebih terfokus pada pelatihan di bidang mata pencaharian, karena sesuai dengan tujuan awal program GLACIER yaitu mengembangkan rantai ekonomi hijau melalui mata pencaharian berkelanjutan. Selain itu pelatihan yang disertai dengan pemahaman mengenai perikanan dan pertanian akan berdampak langsung bagi masyarakat di kawasan Eks PLG, sebab sebagian besar dari mereka bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani.

6. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga

Pada indikator perlindungan terutama terhadap kelompok-kelompok lemah yang dalam hal ini tertuju pada masyarakat lokal di kawasan Eks PLG, ILO melalui program GLACIER melakukan kegiatan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas lembaga, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat di kawasan Eks PLG serta staf anggota Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengenai konsep *green jobs* ILO dan Konvensi ILO No. 169, tentang masyarakat adat. Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- a. Pada bulan Desember 2012, para petugas staf UKP4 diutus untuk menghadiri Kampus *International Training Centre of the ILO (ITC ILO)* di Turin, Italia untuk menghadiri *Green Jobs Learning Forum*. Hal ini dilakukan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan mengenai konsep *green jobs*. Selain itu kegiatan tersebut juga memiliki tujuan dalam pengembangan kelembagaan, sehingga membuat Satgas UKP4/REDD+ mampu mengusung konsep *green jobs* dalam strategi REDD+, serta demi membangun kemitraan yang lebih kuat antara ILO dan UKP4.
- b. Pengadaan lokakarya nasional yang membahas tentang Masyarakat Adat pada 19-20 November 2012 di Hotel Borobudur, Jakarta, di mana ILO melalui GLACIER melibatkan empat pemangku kepentingan lokal diantaranya adalah sekretariat pusat Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), anggota sekretariat REDD+ provinsi, dan Lembaga Dayak Panarung.

- c. Melibatkan 40% perempuan dan 30% kaum muda serta 2% untuk penyandang disabilitas dalam setiap program GLACIER sebagai bentuk pemberian pemahaman tentang pelestarian lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi, serta penerapan program perencanaan partisipatif bersama masyarakat di lima desa sasaran.

Sebagian besar kegiatan ini lebih terfokus pada pemberian pemahaman mengenai pelestarian lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi, serta pemahaman mengenai pembangunan yang berhubungan dengan masyarakat adat di mana hal tersebut merupakan kebutuhan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan program pembangunan berbasis lingkungan di masa yang akan datang. Sejauh ini program pembangunan berbasis lingkungan adalah pilihan yang cocok bagi pemangku kepentingan demi mengurangi deforestasi dan degradasi lahan gambut serta untuk mengurangi gas karbon tanpa mengganggu hukum masyarakat adat sesuai dengan Konvensi ILO No. 169. Tentu saja hal tersebut masuk ke dalam asas perlindungan yang mana setelah memahami dua hal penting di atas, maka para pemangku kepentingan akan mampu melindungi kaum kelompok lemah (masyarakat lokal) dalam setiap programnya.

Hasil dari implementasi kegiatan ini pun dapat dilihat dari adanya upaya pemerintah Kalimantan Tengah untuk menerapkan pendidikan tentang pertumbuhan ekonomi hijau di sekolah-sekolah dalam hal ini telah diterapkan di sebelas sekolah (SD, SMP, SMA) Kota Palangkaraya, meningkatkan Peraturan Gubernur No.10/2012 mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yang bersamaan juga untuk memastikan manfaat terkait dengan jasa ekosistem serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadi Peraturan Daerah. Dengan kata lain, tindakan Pemerintah Kalimantan Tengah dalam menanggapi kegiatan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas lembaga dari GLACIER akan berpotensi mempromosikan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh dan merata di pedesaan, masyarakat terpinggirkan, dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Kesimpulan

Implementasi GLACIER di Kalimantan Tengah, merupakan sebuah program dari ILO yang dirancang untuk memperbaiki akses ke mata pencaharian berkelanjutan, serta menerapkan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang mendukung kelestarian lingkungan bagi masyarakat lokal di kawasan Eks PLG. Terdapat enam program GLACIER, yaitu: Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran, Pengelolaan Tata Ruang dan Infrastruktur, Pengelolaan dan Pelestarian Lahan Gambut Secara Berkelanjutan, Revitalisasi Pertanian, Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat, serta Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga.

Pelaksanaan enam program GLACIER, empat program diantaranya berhasil menurunkan angka kemiskinan di kawasan Eks PLG, meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dan masyarakat lokal tentang mata pencaharian *pro* lingkungan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, dan meningkatkan infrastruktur dalam memudahkan akses menuju pasar. Namun, di balik keberhasilan tersebut ada dua program yang belum berjalan signifikan, karena tidak mampu mengurangi luas kebakaran di kawasan Eks PLG yang mengalami perluasan

signifikan pada tahun 2015, serta meningkatkan pendapatan dari hasil sumber daya lokal dengan jangka waktu menengah dan panjang. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi warga dalam pelaksanaan kegiatan, serta kurang meratanya pemberian bibit karet yang digunakan sebagai mata pencaharian sumber daya lokal jangka menengah dan panjang.

Daftar Pustaka

Buku

Anwas, M. Oos. 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung: Alfabeta

Keraf, A. Sonny. 2001, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas

Noor, M. 2001, *Pertanian Lahan Gambut Potensi dan Kendala*. Kanisius: Yogyakarta

Suharto, Edi. 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat “Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial”*. Bandung: Refika Aditama

Topatimasang, Roem. 2012, *Lahan Gambut dan Perubahan Iklim: Distorsi Sains, Politik, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Insist

Jurnal

Dian Verdiana QH “Pengelolaan Terpadu Kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Hektar di Kalimantan Tengah”.

Media Online

Gambaran Umum Kawasan Bergambut Kalteng, <http://kalteng.go.id/indo/gambut.htm> diakses 13 November 2016

Governors’ Climate & Forest Task Force, <http://www.gcftaskforce.org/documents/Kalteng%20-%20GCF%20Draft%20Booklet.pdf> diakses 20 September 2016

Green Livelihood Access for Central Kalimantan’s Inclusive Environmental Response to Climate Change (GLACIER), <http://apgreenjobs.ilo.org/project/201cgreen-livelihood-access-for-central-kalimantans-inclusive-environmental-response-to-climate-change-glacier>

Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Di http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_241342.pdf diakses 16 Maret 2016

Hutan dan Lahan Gambut: Berbagai Manfaat dan Jasa Lingkungan Yang Wajib Dilestarikan, <http://tgc.lk.ipb.ac.id/2016/04/12/hutan-dan-lahan-gambut-berbagai-manfaat-dan-jasa-lingkungan-yang-wajib-dilestarikan/> diakses 15 September 2016

Kalimantan Tengah Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Di <http://greengrowth.bappenas.go.id/id/program/publication/46/kalimantan-tengah-menuju-pertumbuhan-ekonomi-hijau> diakses pada 25 Desember 2017

Konteks REDD+ di Indonesia: Pemicu, Pelaku, dan Lembaganya, <https://books.google.co.id/books?id=T9DHBQAAQBAJ&pg=PA42&lpg=PA42&dq=wilayah+di+kalimantan+tengah+yang+sering+digunakan+sebagai+aktivitas+penebangan+liar&source=> diakses 18 Januari 2017

My Year With the Dayak Ngaju of Central Kalimantan. Di <http://iloblog.org/2013/08/07/dayak-ngayu-kalimantan/> diakses 16 Februari 2016

Perizinan Bagi Tindak Kriminal: Betapa Perluasan Kelapa Sawit Mendorong Penebangan Liar di Indonesia, <https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime-Indonesia-language-version.pdf> diakses 26 April 2017

Program ILO di Indonesia: Capaian 2012. Di http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_205664.pdf diakses 14 Februari 2016

Program ILO di Indonesia: Capaian 2013, http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/114B09_57_indo.pdf diakses 04 Mei 2017

Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar, http://faperta.ugm.ac.id/download/publikasi_dosen/tejoyuwono/1991/1998%20proy.pdf diakses pada 02 Mei 2018

UN Agencies: Green Livelihood Access for Central Kalimantan's Inclusive Environmental Response to Climate Change (GLACIER). Di <http://bpredd.reddplusid.org/pustaka/dokumen/dokumen-satgas-redd/provinsi-percontohan/un-agencies> diakses 07 Mei 2017